

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmadi, Wiratni, 2006, *Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- H. S, Salim, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C. S. T, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamello, H. Tan, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2011, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta.
- Parlindungan, A. P, 2008, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.

- , 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Shidarta dan Sulistyowati Irianto, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2004, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S. W, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemrintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume.9 Nomor.4, Edisi Oktober-Desember, 2015.
- Bonus Aprianto Hernanda, "Problematika Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Temuan Hasil Verifikasi Lapangan Nilai Bangunan Tidak Sesuai Dengan Nilai Jual Objek Pajak Dan Nilai Perolehan Objek Pajak", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2014.

Erika Jenri Halasan Panjaitan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Pekanbaru”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.

Ida Fithriani, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Kabupaten Barito Kuala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Muhammad Siddiq, “Peran Dan Perlindungan PPAT Dalam Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4914.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Lembar Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 09 Tahun 2010.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 46.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 Tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-81/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 Tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

D. Internet

Syafran Sofyan, "Notaris Openbare Ambtbenaren", <http://www.jimlyschool.com>, diakses tanggal 25 September 2016.

<Http://www.m.persamaankata.com>, diakses pada tanggal 25 September 2016.